**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

**MELALUI BELANJA MODAL**

**Siswadi**

Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Mataram

Instansi: Dinas Pendapataan, Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahKota Bima

Alamat: Jl.Durian No.8,Rabangodu Utara, Raba, Kota Bima, NTB

bondchot@yahoo.co.id

**Endar Pituringsih**

**M. Irwan**

Dosen Jurusan Manajemen Universitas Mataram

endar07ringsih@yahoo.co.id

***Abstract:*** *This study aims to determine the effect of Economic Growth is proxied by Regional Gross Domestic Product, Local Revenue, Revenue-Sharing, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds against Human Development Index (HDI) through Capital Expenditures. Testing was conducted on 9 (nine) districts/cities in West Nusa Tenggara Province which has resulted in Local Government Financial Reports in 2005-2013. Analysis of data on research done by using path analysis. The results in this study indicate that Capital Expenditures have full mediating effect on the influence of Revenue-Sharing to the Human Development Indeks and partially mediating effect on the influence of Local Revenue on the Human Development Indeks. Capital Expenditure mediating effect on the influence of Economic Growth, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds can not be determined. This study is expected to be input to Local Governments as policy makers in the region to pay more attention to the allocation of revenue sources into the expense, especially Capital Expenditures, which support the welfare and human development.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi yang diproksikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal. Pengujian dilakukan pada 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2005-2013. Analisis data pada penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki efek mediasi penuh pada pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan efek mediasi sebagian pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Efek mediasi Belanja Modal pada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat ditentukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan di daerah untuk lebih memperhatikan pengalokasian sumber-sumber pendapatan ke dalam belanja daerah, terutama belanja modal, yang menunjang kesejahteraan dan pembangunan manusia.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal

**PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah saat ini dihadapkan pada banyaknya tuntutan, salah satunya adalah tuntutan masyarakat agar pemerintah daerah mampu menciptakan masyarakatnya yang sejahtera. Tuntutan ini merupakan implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasi di daerah. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah harus melakukan pembangunan di segala aspek yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk pembangunan sumber daya manusia.

Tingkat pencapaian IPM sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah, terutama kebijakan alokasi belanja dalam APBD. Alokasi belanja dimaksud, secara langsung maupun secara tidak langsung berhubungan dengan indikator pengukuran IPM, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur maupun komponen lainnya yang berpengaruh terhadap pembangunan kualitas manusia. Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa belanja modal yang merupakan salah satu unsur belanja dalam akuntansi sektor publik pada pemerintahan, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penambahan aset. Aset yang dimaksudkan dalam hal ini adalah dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur yang menunjang pelayanan publik. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, maka kesejahteraan dan kualitas hidup manusia juga diharapkan meningkat.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Setyowati dan Yohana (2012) dan Maiharyanti (2010)dengan penambahan variabel Dana Bagi Hasil (DBH), karena merupakan salah satu komponen pendapatan daerah dalam dana perimbangan APBD. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.

**TINJAUAN TEORETIS**

**Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

A*gency theory* dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubunganantara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran Dana Perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diproksikan oleh DPRD(prinsipal) dengan Pemerintah Daerah (agen). Oleh karena itu sebagaikonsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, Pemerintah Pusat menurunkan Dana Perimbangan yang tujuannya adalah membantu Pemerintah Daerah baikdalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari maupun memberi pelayananpublik yang lebih baik kepada masyarakat.

**Akuntabilitas Publik**

Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Schiavo-Campo and Tomasi, 1999). Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Pemerintah daerah harus menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

**Anggaran Sektor Publik**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas (Mardiasmo, 2009:61).

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Halim dan Nasir (2006 : 44), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan Pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang merupakan pedoman bagi Pemda dalam memberikan pelayanan kepada publik dalam masa satu tahun anggaran. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses penyusunan APBD dimulai dengan pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD dan tahun anggaran berikutnya yang sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah kepada DPRD.

**Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksikan ke masyarakat bertambah (Sukirno, 2010:9). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan pekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun.Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah diproksikan dengan PDRB atas Dasar Harga Konstan. PDRB atas Dasar Harga Konstan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengeliminasi faktor-faktor kenaikan harga.

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Bratakusumah dan Solihin (2002) pengertian PAD adalah pendapatan yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah tersebut. Berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, kelompok PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Dana Bagi Hasil (DBH)**

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatkan potensi daerah penghasil berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka prinsip DBH adalah pengalokasian dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan.DBH dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan DBH Pajak.

**Dana Alokasi Umum (DAU)**

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa DAU merupakan dana yangberasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuankeuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU suatu daerah ditentukan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity).

**Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang.

**Belanja Modal**

Belanja modal merupakan salah satu komponen belanja langsung yangdigunakan untuk membiayai kebutuhan investasi. Belanja modal yaitupengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan dapat menambahaset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo,2009:67). Belanja modal dapat dikelompokkan menjadi lima kategori antara lain,belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi danjaringan, serta belanja modal fisik lainnya.

Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan; serta kehidupan yang layak kemudian masing-masing dimensi direpresentasikan dengan indikator. Dimensi umur panjang dan sehat direpresentasikan dengan indikator angka harapan hidup; dimensi pengetahuan direpresentasikan dengan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; serta dimensi kehidupan yang layak direpresentasikan oleh indikator kemampuan daya beli. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (BPS, 2008)

**KERANGKA KONSEPTUAL DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, tinjauan pustaka, dan penelitian terdahulu, disusunlah model penelitian. Model penelitian ini merupakan model jalur.



**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal**

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah diproksikan dengan PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000.

Penelitian Setyowati dan Yohana (2012) menyimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang diproksikan dengan PDRB terbukti tidak berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).Tuasikal (2008) dan Mirza (2012) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan ter­hadap IPM.

Christy dan Priyo (2009), Maiharyanti (2010), Setyowati dan Yohana (2010), dan Mirza (2012) menyimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.Sebaliknya, Sumiyati (2011) dan Syahril (2011) menyimpulkan bahwa secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pada penelitian terdahulu nampak bahwa IPM dapat dipengaruhi oleh belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang diproksikan dengan PDRB secara signifikan dapat mempengaruhi belanja modal, sehingga secara tidak langsung PDRB dapat mempengaruhi IPM melalui alokasi belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal**

Tujuan PAD adalah memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerahnya.Kemampuan pembiayaan daerah yang bersumber dari PAD merupakan indikator dari kemandirian daerah. PAD digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dapatdalam bentuk pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya yang dapat menunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Maiharyanti (2010) dan Setyowati dan Yohana (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian Tuasikal (2008) dan Maiharyanti (2010) menyatakan bahwa secara parsial PAD berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Berbeda dengan Tuasikal (2008) dan Maiharyanti (2010), Oktora dan Pontoh (2013) dalam penelitiannya yang bertujuan melihat hubungan secara umum PAD dengan Belanja Modal menyimpulkan bahwa hasil uji korelasi PAD dengan Belanja Modal menunjukkan terdapat hubungan yang kurang erat akibat rendahnya proporsi PAD dalam komposisi Pendapatan Daerah.Wandira (2013) menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel PAD terhadap Belanja Modal.

Syahril (2011) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik secara parsial maupun simultan bersama Belanja Modal (BM), signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Christy dan Priyo (2009), Maiharyanti (2010), Setyowati dan Yohana (2010), dan Mirza (2012) menyimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.Sebaliknya, Sumiyati (2011) dan Syahril (2011) menyimpulkan bahwa secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa IPM dapat dipengaruhi oleh belanja modal. PAD secara umum mempengaruhi belanja modal, walaupun terdapat penelitian yang menghasilkan bahwa PAD tidak berhubungan erat dengan belanja modal. Untuk itu, secara tidak langsung PAD dapat mempengaruhi IPM melalui alokasi belanja modal

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal

**Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal**

Sebagai salah satu komponen dari Dana Perimbangan, DBH yang bersumber dari APBN dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Sebagai salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota, DBH ditujukan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya, sehingga pemerintah daerah dapat menggunakannya untuk penyediaan infrastruktur yang berkenaan dengan potensi tersebut melalui belanja modal.

Wandira (2013) menyimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan variabel DBH terhadap Belanja Modal. Disamping itu, secara simultan, variabel PAD, DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Harahap (2010) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH)berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Christy dan Priyo (2009), Maiharyanti (2010), Setyowati dan Yohana (2010), dan Mirza (2012) menyimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.Sebaliknya, Sumiyati (2011) dan Syahril (2011) menyimpulkan bahwa secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap belanja modal dan IPM, serta belanja modal berpengaruh terhadap IPM. Sama halnya dengan komponen dana perimbangan lainnya, DBH diharapkan dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H3 : Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal

**Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu Dana Perimbangan adalah adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.

Penelitian Tuasikal (2008), Christy dan Priyo (2009), serta Oktora dan Pontoh (2013) menunjukkan bahwa dana alokasi umum mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Wandira (2013) membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel DAU terhadap Belanja Modal.Sebaliknya, Maiharyanti (2010) menyatakan bahwa koefisien jalur DAU tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal.

Harahap (2010) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), baik secara parsial dan secara simultan bersama Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Christy dan Priyo (2009), Maiharyanti (2010), Setyowati dan Yohana (2010), dan Mirza (2012) menyimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.Sebaliknya, Sumiyati (2011) dan Syahril (2011) menyimpulkan bahwa secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa DAU secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja modal dan IPM, sehingga diharapkan bahwa DAU dapat secara signifikan pula berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM melalui alokasi belanja modal pada APBD.Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H4 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal

**Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal**

DAK adalah alokasi dari APBN kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu di Indonesia dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prioritas Nasional.DAK merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Sama halnya dengan realisasi DAU sebagai dana perimbangan, realisasi DAK juga dilaporkan oleh pemerintah daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian Tuasikal (2008), Maiharyanti (2010), dan Wandira (2013) menyatakan bahwa secara parsial DAK berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Sejalan dengan ketiga penelitian sebelumnya, Oktora dan Pontoh (2013) menyatakan bahwa DAK dengan Belanja Modal menunjukkan hubungan yang erat.

Harahap (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK), baik secara parsial dan secara simultan bersama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Christy dan Priyo (2009), Maiharyanti (2010), Setyowati dan Yohana (2010), dan Mirza (2012) menyimpulkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.Sebaliknya, Sumiyati (2011) dan Syahril (2011) menyimpulkan bahwa secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Maiharyanti (2010) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal sebagai variabel intervening. Sejalan dengan Maiharyanti (2010), Setyowati dan Yohana (2012) dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM).

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa DAK secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja modal dan IPM, sehingga diharapkan bahwa DAK dapat secara signifikan pula berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM melalui alokasi belanja modal pada APBD.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H5 : Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal

**METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebanyak 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota, yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten yakni Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, dan Bima serta 2 (dua) Kota yaitu Kota Mataram dan Kota Bima.

Pemerintah daerah yang menjadi sampel adalah pemerintah daerah yang telah memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2005-2013, serta terpublikasi pada NTB Dalam Angka untuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2005-2013, yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima, Kota Mataram, dan Kota Bima.Dimensi waktu yang digunakan adalah 9(sembilan) tahun.

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (diproksikan dengan PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2005-2013 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB. Data PAD, DAU, DAK, dan DBH masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi NTB diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2005-2013.

Variabel-variabel dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

**Pertumbuhan Ekonomi** diproksikan dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000. Data ini diukur berdasarkan angka yang tercantum dalam daftar PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2005-2013 yang diukur dengan skala rasio.

**PendapatanAsli Daerah (PAD)**diperoleh dari total realisasi PAD masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB pada tahun 2005-2013 yang diukur dengan skala rasio.

**Dana Perimbangan** terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

* Dana Bagi Hasil (DBH)diperoleh dari total realisasi DBH masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB pada tahun 2005-2013 yang diukur dengan skala rasio.
* Dana Alokasi Umum (DAU)diperoleh dari total realisasi DAU masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB pada tahun 2005-2013 yang diukur dengan skala rasio.
* Dana Alokasi Khusus (DAK)diperoleh dari total realisasi DAK masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB pada tahun 2005-2013 yang diukur dengan skala rasio.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** diperoleh berdasarkan angka pada dokumen IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB tahun 2005-2013 yang diukur dengan skala rasio.

**Belanja Modal** diperoleh dari total realisasi belanja modal masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB pada tahun 2008-2012 yang diukur dengan skala rasio.

**Metode dan Teknik Analisis Data**

* 1. Analisis Deskriptif
	2. Uji Asumsi Klasik
	3. Metode Analisis Data

**Tahap Pertama**: Menentukan model diagram jalur berdasarkan paradigma hubungan antar variabel (seperti pada Gambar 1).

**Tahap Kedua**: membuat diagram jalur persamaan strukturalnya.



Berdasarkan gambar 2tersebut, maka model penelitian ini termasuk dalam model persamaan dua jalur. Model strukturalnya adalah sebagai berikut:

* persamaan struktural 1

Y = ρ1X1 + ρ2X2 + ρ3X3 + ρ4X4 +ρ5X5 + ɛ1

* persamaan struktural 2

Z = ρ6X1 + ρ7X2 + ρ8X3 + ρ9X4 + ρ10X5 + ρ11Y + ɛ2

dimana:

X1 : Pertumbuhan Ekonomi (diproksikan dengan PDRB)

X2 : PAD

X3 : DBH

X4 : DAU

X5 : DAK

Y : Belanja Modal

Z : IPM

ρ : Koefisien Jalur

ɛ : error

**Tahap Ketiga**: Mengolah dan menganalisis data dengan SPSS versi 21 sesuai dengan persamaan struktural pada tahap kedua.

**Tahap Keempat**: Penafsiran hasil analisis data.

1. Analisis Korelasin dan Regresi Persamaan Struktural 1 dan Persamaan Struktural 2
2. Perhitungan Pengaruh;
* pengaruh langsung (*direct effect*)
* pengaruh tidak langsung (*indirect effect*)
* pengaruh total
1. Mendeteksi Signifikansi Efek Mediasi;untuk melihat apakah belanja modal sebagai variabel intervening benar-benar memperlihatkan adanya efek mediasi akan digunakan model Baron dan Kenny (1986). Baron dan Kenny (1986) mempersyaratkan kondisi-kondisi berikut dalam rangka memperlihatkan efek mediasi oleh variabel intervening:
* masing-masing variabel *exogenous* (Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DBH, DAU, dan DAK) secara signifikan mempengaruhi variabel *endogenous* (IPM).
* masing-masing variabel *exogenous* (Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DBH, DAU, dan DAK) secara signifikan mempengaruhi variabel intervening(Belanja Modal).
* variabel intervening (Belanja Modal) secara signifikan mempengaruhi variabel *endogenous* (IPM).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Diagram jalur yang dihasilkan adalah sebagai berikut:



**PEMBAHASAN**

Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah tentunya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, sehingga kualitas hidup masyarakat didaerahnya terus berkembang. Kualitas hidup masyarakat ini terukur dengan indikator dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga indikator ini yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah daerah selaku penerima amanah (agen) dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah bertanggung jawab untuk terus meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di daerahnya, dengan mengalokasikan belanja yang menunjang indikator-indikator pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (diproksikan dengan PDRB) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal**

Pengaruh langsung variabel PDRB terhadap Belanja Modal berpenga­ruh negatif dan tidak signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara langsung Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Tidak signifikannya pengaruh PDRB terhadap belanja modal ini bertentangan dengan hipotesis penelitian yang me­nyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal, sehingga tidak dapat ditentukan efek mediasi dari belanja modal, walaupun Belanja Modal signifikan mempengaruhi IPM.

Penelitian ini juga menghasilkan pengaruh langsung PDRB terhadap IPM yang menunjukkan bahwa PDRB berpenga­ruh negatif dan signifikan.Berdasarkan data penelitian, hal ini disebabkan karena nilai PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi NTB tahun 2005-2013 mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, namun sebaliknya, data IPM dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hasil ini bermakna bahwa mening­kat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi akan merubah pola konsumsi masyarakat dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat untuk semakin tinggi atau rendah. Namun, tinggi atau rendahnya daya beli ini justru berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB tahun 2005-2013.

Pengaruh tidak langsung PDRB terhadap IPM melalui belanja modal sesuai hasil analisis, menunjukkan bahwa peningkatan PDRB tidak akan menurunkan/meningkatkan Belanja Modal. Sedangkan, peningkatan Belanja Modal dapat meningkatkan IPM, yang memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat, efektif dilaksanakan melalui penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Hasil ini menolak hipotesis (H1) yang dibangun. Walaupun peningkatan belanja modal akan turut meningkatkan IPM, namun PDRB tidak signifikan mempengaruhi peningkatan belanja modal dan IPM. Hal ini membuktikan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang lebih dominan dalam membentuk belanja modal di pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, antara lain PAD dan dana perimbangan.

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa variabel PAD terhadap Belanja Modal berpenga­ruh positif dan signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara langsung Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara positif signifikan terhadap Belanja Modal daerah. Hal ini disebabkan karena PAD merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.Berdasarkan hasil penelitian juga dapat dikemukakan bahwa variabel PAD berpenga­ruh positif dan signifikan secara langsung terhadap IPM pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.Kemampuan pemerintah dalam hal memaksimalkan kinerja keuangan pemerintah sangat dituntut guna mendukung peningkatan IPM di daerahnya, melalui salah satunya adalah intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Pengaruh tidak langsung PAD terhadap IPM melalui Belanja Modal sebesar 0,177. Untuk melihat signifikansi pengaruh tidak langsung ini dilakukan proses *bootstrapping*. Berdasarkan hasil perbandingan nilai t hitung dengan t tabel pada pengujian signifikansi efek mediasi belanja modal pada pengaruh PAD terhadap IPM, disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,177 adalah signifikan. Nilai koefisien mediasi sebesar 0,177 yang merupakan pengaruh tidak langsung PAD terhadap IPM melalui Belanja Modal ini lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh langsung PAD terhadap IPM sebesar 0,575, maka disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal sebagai intervening sebagian dari pengaruh PAD terhadap IPM. Hasil penelitian tidak dapat menolak hipotesis (H2) yang dibangun.

**Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal**

Berdasarkan hasil penelitian variabel DBH berpenga­ruh positif dan signifikan secara langsung terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara langsung Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Hasil ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang besar pula. Hasil ini memperkuat indikasi bahwa alokasi belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD maupun dana perimbangan lainnya. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian, juga dapat diketahui bahwa variabel DBH berpenga­ruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan DBH akan turut meningkatkan belanja modal. Peningkatan belanja modal ini juga akan memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan unsur ekonomi yang tercermin dengan meningkatnya IPM.

Pengaruh tidak langsung DBH terhadap IPM melalui Belanja Modal sebesar 0,154. Berdasarkan hasil teknik *bootstrapping* pada Lampiran 4 dan perbandingan nilai thitung dengan nilai ttabel­ pada pengujian signifikansi efek mediasi Belanja Modal pada pengaruh DBH terhadap IPM, disimpulkan bahwa koefisien mediasi Belanja Modal ini tidak signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memediasi penuh DBH terhadap IPM. Hal ini bermakna bahwa DBH hanya akan dapat mempengaruhi IPM jika melalui Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat menolak hipotesis (H3) yang dibangun.

**Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU berpenga­ruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.Penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara langsung Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAU berpenga­ruh negatif dan signifikan terhadap IPM pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah, namun sesuai dengan formulasinya, DAU akan lebih diprioritaskan kepada pemenuhan komponen alokasi dasar. Alokasi dasar ini didominasi penggunaannya untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNS.

Hasil penelitian ini menolak hipotesis (H4) yang dibangun.

**Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Belanja Modal**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DAK berpenga­ruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara langsung Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Hasil ini sejalan dengan tujuan pemberian DAK oleh pemerintah pusat yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan ini khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variabel DAK berpenga­ruh positif dan tidak signifikan secara langsung terhadap IPM pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi DAK pada Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB, belum menitikberatkan pada belanja-belanja yang menunjang peningkatan akses masyarakatnya akan pendidikan, kesehatan dan unsur ekonomi. Untuk itu diharapkan pemerintah daerah harus lebih menyinkronkan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan prioritas nasional, yang menunjang ketiga indikator IPM didaerahnya masing-masing.

Pengaruh tidak langsung DAK terhadap IPM melalui Belanja Modal sebesar 0,278. Namun karena variabel DAK tidak signifikan mempengaruhi IPM secara langsung, maka nilai pengaruh tidak langsung DAK terhadap IPM melalui Belanja Modal tidak dapat ditentukan signifikansinya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini menolak hipotesis (H5) yang dibangun.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: Belanja Modal merupakan intervening sebagian pada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Belanja Modal merupakan intervening penuh pada pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Belanja Modal tidak dapat memediasi pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (diproksikan dengan PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi tambahan pada penelitian sejenis di masa yang akan datang dengan menambahkan variabel yang termasuk sumber pendapatan dalam APBD seperti Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Penerimaan Pembiayaan atau seluruh Pendapatan Transfer. Penelitian ini juga dapat dikembangkan dengan menggunakan variabel intervening yang lain, seperti belanja Hibah atau Bantuan Sosial. Peneliti juga menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi NTB serta umumnya di Indonesia untuk mencantumkan sumber dana pada masing-masing item rincian obyek belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini dapat pula dikembangkan dengan terlebih dahulu menentukan rentang waktu yang tepat untuk aset daerah dapat mempengaruhi pembangunan manusia. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperhatikan keterbatasan penelitian ini, yang diantaranya, (1) penelitian ini belum mampu memperoleh data realisasi belanja modal dalam APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang spesifik digunakan untuk menunjang indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu belanja pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, (2) penelitian ini tidak memperhatikan rentang waktu yang tepat bagi aset daerah dari realisasi belanja modal dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dan (3) penelitian ini tidak memasukkan realisasi (LRA) APBD pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

**DAFTAR PUSTAKA**

*Anonymous*. 2011. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. SL Media. Tangerang.

*Anonymous*. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Mini Jaya Abadi. Jakarta.

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.

Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 5. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. 2008. *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_ Provinsi NTB. 2013. *PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012*. Badan Pusat Statistik. Mataram.

\_\_\_\_\_\_\_ Kota Bima. 2012. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bima 2011*. Badan Pusat Statistik. Kota Bima.

Baron, R. M.dan Kenny, D. A. 1986. *The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations*. Journal of Personality andSocial Psychology, 51, 1173-1182.

Bratakusuma, S. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah.*PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Christy, F. A. dan Priyo H. A. 2009. *Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rdNational Conference* UKWMS Surabaya, Oktober 10th 2009.

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, *Edisi 7*.Universitas Diponegoro. Semarang.

Ghulam, R. 2011. *Agency Theory Dalam Sektor Publik di Indonesia*. Jurnal Academia Education Vol. 1 No.2. Yogyakarta.

Gujarati, D.N. 2004. *Basic Econometrics, 4th edition*. The McGraw-Hill Companies. New York.

Halim, A. 2008. *Analisis investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_\_\_ dan Nasir, A. J. 2006. *Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang*. Majalah Manajemen Usahawan Indonesia N0.06/Tahun XXXV.

\_\_\_\_\_\_\_ dan Muhammad, I. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_\_\_ dan Muhammad, S. K. 2013. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.

Harahap, R. U. 2010. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara*. (TesisSekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara).

Jogiyanto, H. M. 2011. *Konsep dan Aplikasi Stuctural Equation Modeling Berbasis Varian Dalam Penelitian Bisnis*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Kuncoro, M. 2009. *Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Kuncoro, M. 2013. *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Maiharyanti, E. 2010. *Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam*. (TesisSekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara).

Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.

\_\_\_\_\_\_\_. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi IV. Andi. Yogyakarta.

Mirza, D. S. 2012. *Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009*. *Economics Development Analysis Journal*, September 2012.

Nordiawan, D. dan Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.

Oktora, F. E. dan Winston. 2013. *Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Accountability* Vol. 2 No. 1, Juni 2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sarjono,H dan Julianita, W.2011. *SPSS vs Lisrel: Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Salemba Empat. Jakarta.

Sarwono,J.2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Andi. Yogyakarta.

Setyowati, L.,dan Yohana, K. S. 2012. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. *Prestasi*Vol. 9 No. 1*.* ISSN 1411-1497.

Sudjana, M. A. 1989. *Metoda Statistika Edisi Ke-5*. Tarsito. Bandung.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

Sumiyati, E. E. 2011. *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat*. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1.

Sunyoto, D. 2011. *Praktik SPSS untuk Kasus*. Nuha Medika.Yogyakarta.

Syahril. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. (TesisSekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara).

Tuasikal, A. 2008. *Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol. 1, No. 2. Juli 2008.

UNDP. 1996. *Human Development Report.* Oxford University Press. New York

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2004. *Human Development Report. United Nations Development Programme*. New York.

Wandira, A. G. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian Belanja Modal*. *Accounting Analysis Journal (AAJ),* Vol. 2, No. 1. Februari 2013.